





**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan
Badan Layanan Umum
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal**


LAPORAN KINERJA

**TRIWULAN - I
TAHUN 2024**



 Jalan Martoloyo PO BOX 22 Tegal, Kode Pos 52122

 (0283) 356393/322064

 <http://kkp.go.id/BPPSDM/bp3tegal>

bppp.tegal@kkp.go.id



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat Serta Karunia-Nya, Badan layanan Umum (BLU) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj BLU BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran Tahun 2024 yang terkait dengan evaluasi pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan disisi lain laporan kinerja merupakan alat kendali, pemacu dan umpan balik peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.

Mengingat bahwa Laporan Kinerja merupakan indikator keberhasilan dari suatu penyelenggaraan organisasi pemerintahan, kami berusaha dengan sebaik mungkin untuk dapat menyajikan laporan ini agar dapat digunakan dalam menyusun kebijakan di BPPP Tegal.

Tegal, 26 April 2024
Kepala Balai,

ACHMAD SUBIJAKTO

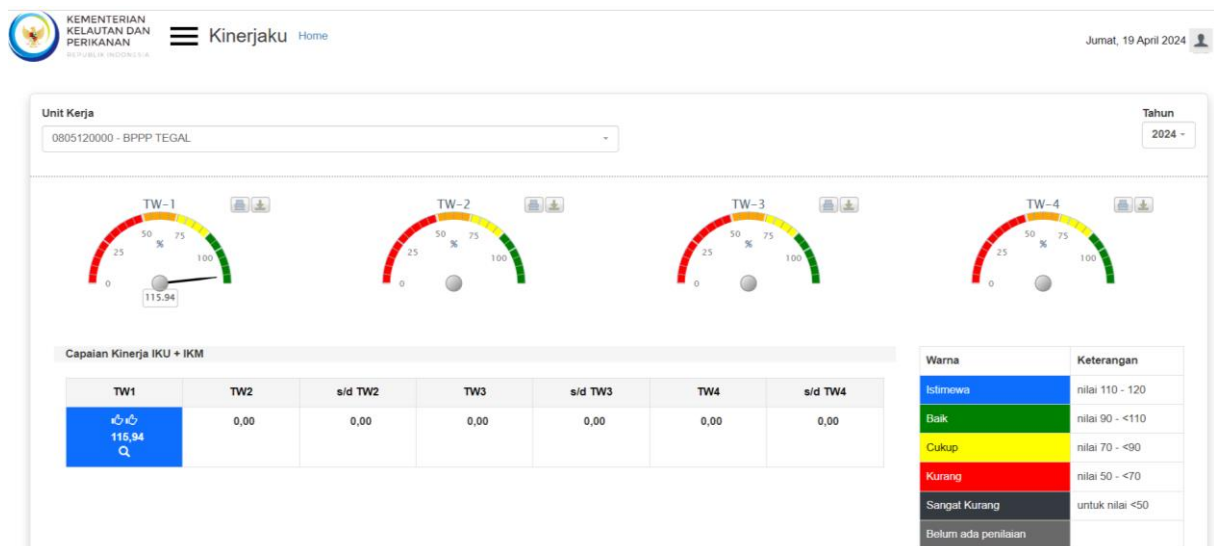


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Tegal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja BPPP Tegal pada Tahun 2024 selaras dengan kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sehingga BPPP Tegal selaku UPT yang berada di bawahnya turut berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPSDMKP. BPPP Tegal memiliki tanggung jawab untuk mendukung 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja, secara umum kinerja BPPP Tegal pada Triwulan I Tahun 2024 masuk dalam kategori baik. Perolehan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis yaitu 115,94%.



Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal yang terukur pada Triwulan I Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) indikator yang telah tercapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024

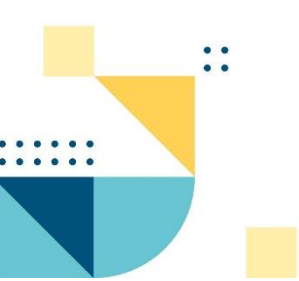
NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Target TW I	Realisasi Tahun 2024	
						Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	72	-	-	-
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	17.960	5.000	8.015	120 (160,3)
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	10,53	1,58	2,97	120 (187,97)
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	730	33	324	120 (981,82)
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	49	-	-	-
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	6.400	150	155	103,33
		7	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)	255	-	-	-
		8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	511	10	17	120 (170)
		9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)	1.897	-	-	-
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas)	3	-	-	-
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	11	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal (Unit)	2	-	-	-
		12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)	1	-	-	-
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	20	33,33	120 (166,65)
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (Nilai)	94	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Target TW I	Realisasi Tahun 2024	
						Capaian	%
		15	Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP (%)	94	94	106,94	113,77
		16	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	81	-	-	-
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%)	≤ 0,5	-	-	-
		18	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	82	82	80	97,56
		19	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	75	-	-	-
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	82	-	-	-

Pagu Anggaran yang dialokasikan kepada BPPP Tegal Tahun 2024 adalah sebesar Rp 117.004.513,000,- telah terrealisasi sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp 14,945,193,472,- atau 12,77%. Secara umum kinerja BPPP Tegal cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2024 capaian kinerja dengan target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggungjawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Dalam pengumpulan data dukung masih ada ditemukannya duplikasi data dan data yang kurang lengkap yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka perlu dilakukan verifikasi data secara teratur dan teliti sehingga capaian kinerja sesuai dengan data dukung yang ada.

Laporan Kinerja ini berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di Triwulan I Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* Balai. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Balai. BPPP Tegal berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi BPPP Tegal.....	3
1.4. Struktur Organisasi.....	4
1.5. Keragaan SDM BPPP Tegal.....	5
1.6. Potensi dan Permasalahan	6
1.6.1 Potensi.....	6
1.6.2 Permasalahan.....	8
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
1.1. Rencana Strategis	11
1.1.1 Visi.....	11
1.1.2 Misi.....	12
1.1.3 Tujuan	13

1.1.4 Sasaran Kegiatan	13
1.2. Strategi Pelaksanaan Program BPPP Tegal.....	16
1.3. Rencana Kerja Tahun 2024.....	17
1.4. Penetapan Kinerja Tahun 2024	20
1.5. Pengukuran Kinerja.....	22
1.5.1 Rumus Pengukuran	22
1.5.2 Metode Pengukuran Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	26
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
3.2. Akuntabilitas Keuangan	63
3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Sumber Daya.....	90
BAB IV PENUTUP	94
4.1. Capaian Kinerja Utama.....	94
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	96
4.3. Permasalahan dan Rekomendasi.....	97



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Tegal.....	4
Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPP Tegal.....	4
Gambar 3. Komposisi Pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.....	5
Gambar 4. Keragaman pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan.....	5
Gambar 5. Nilai Capaian Kinerja BPPP Tegal TW I Tahun 2024 pada dashboard aplikasi kinerjaku.....	26
Gambar 6. Grafik Purnawidya Pelatihan Masyarakat berdasarkan Jenis Pelatihan, Kompetensi, Tingakt Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	33
Gambar 7. Perbandingan Capaian IKU 2 dengan tahun sebelumnya.....	33
Gambar 8 Perbandingan Capaian PNBP dengan tahun Sebelumnya.....	37
Gambar 9 Perbandingan Capaian SDM KP yang bersertifikasi kompetensi.....	40
Gambar 10 Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh dengan tahun sebelumnya.....	49
Gambar 11 Perbandingan Capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya.....	51
Gambar 12 Perbandingan Capaian IKU 9 dengan tahun sebelumnya.....	54
Gambar 13 Perbandingan IKU Manajemen Pengetahuan dari tahun sebelumnya.....	74
Gambar 14. Realisasi per output anggaran BPPP Tegal s.d Triwulan I.....	87
Gambar 15. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPPP Tegal TW I Tahun 2024 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal TW I Tahun 2024.....	iv
Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2024.....	17
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2024.....	20
Tabel 4.	
Tabel 5. Capaian Kinerja BPPP Tegal TW I Tahun 2024.....	27
Tabel 6. Capaian IKU 1 Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%).....	30
Tabel 7. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 1 DUDI dengan unit kerja sejenis.....	30
Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Tegal.....	32
Tabel 9. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 2 Masyarakat KP dilatih dengan unit kerja sejenis.....	34
Tabel 10. Capaian IKU 3 Nilai PNBSP Satker BPPP Tegal.....	36
Tabel 11. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 3 Nilai PNBSP dengan unit kerja sejenis...37	
Tabel 12. Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)	39
Tabel 13. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi dengan unit kerja sejenis.....	40
Tabel 14. Capaian IKU 5 Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Tegal.....	43
Tabel 15. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 5 Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) dengan unit kerja sejenis.....	44
Tabel 16. Capaian IKU 6 Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Tegal.....	45
Tabel 17. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis.....	46
Tabel 18. Capaian IKU 7 Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Tegal (Kelompok)	48
Tabel 19. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh dengan unit kerja sejenis.....	49

Tabel 20. Capaian IKU 8 Kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Tegal (kelompok)	51
Tabel 21. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan dengan unit kerja sejenis.....	52
Tabel 22. Capaian IKU 9 Kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Tegal (Kelompok)	53
Tabel 23. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang dibentuk dengan unit kerja sejenis.....	55
Tabel 24. Capaian IKU 10 Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Tegal.....	56
Tabel 25. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis.....	56
Tabel 26. Capaian IKU Desa/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK di BPPP Tegal.....	59
Tabel 27. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Desa/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK di BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis.....	60
Tabel 28. Capaian IKU Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal.....	61
Tabel 29. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis.....	62
Tabel 30. Capaian IKU Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal.....	63
Tabel 31. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis.....	63
Tabel 32. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Tahun 2024.....	66
Tabel 33. Capaian IKU 14 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%).....	67
Tabel 34. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal sampai dengan Tahun 2024.....	67
Tabel 35. Capaian IKU 15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal.....	71
Tabel 36. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja dengan unit kerja sejenis.....	72
Tabel 37. Capaian IKU 16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar BPPP Tegal (%).....	74
Tabel 38. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar dengan unit kerja sejenis.....	75
Tabel 39. Kategori Nilai Indeks Profesionalitas ASN.....	77

Tabel 40. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 17 Indeks Profesionalitas ASN dengan unit kerja sejenis.....	78
Tabel 41. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 18 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK dengan unit kerja sejenis.....	80
Tabel 42. Capaian IKU 19 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%).....	81
Tabel 43. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 19 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan unit kerja sejenis.....	82
Tabel 44. Capaian IKU 20 Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal.....	83
Tabel 45. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 20 Penilaian mandiri SAKIP dengan unit kerja sejenis.....	84
Tabel 46. Indikator dan Bobot Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran.....	85
Tabel 47. Capaian IKU 21 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal.....	85
Tabel 48. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) Capaian IKU 20 Penilaian mandiri SAKIP dengan unit kerja sejenis.....	86
Tabel 49. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja.....	87
Tabel 50. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	88
Tabel 51. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama.....	88
Tabel 52. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPPP Tegal 2023.....	88
Tabel 53. Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2024.....	93
Tabel 54. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja triwulan II Tahun 2024.....	94
Tabel 55. Permasalahan dan Rekomendasi Tahun 2024.....	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	1
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu *“Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”*. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga network/komunikasi, sedangkan pada era *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan.

Salah satu program kerja yang menjadi konsentrasi Presiden Jokowi (2019-2024) adalah pembangunan SDM melalui kerja sama dengan industri dan menggunakan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. Melalui Visi Pemerintah “SDM Unggul Indonesia Maju” yang akan dicapai dengan membangun SDM yang kompeten, berkarakter dan komitmen kebangsaan. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan individu-individu yang produktif, memberikan manfaat serta dapat bekerja dengan cepat, tepat dan profesional.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020–2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal serta mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya KP. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal turut berkontribusi pada kebijakan pokok tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian pada Triwulan I Tahun 2024;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Tegal;
3. Sebagai umpan balik (*Feedback*) untuk perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Tegal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi BPPP Tegal

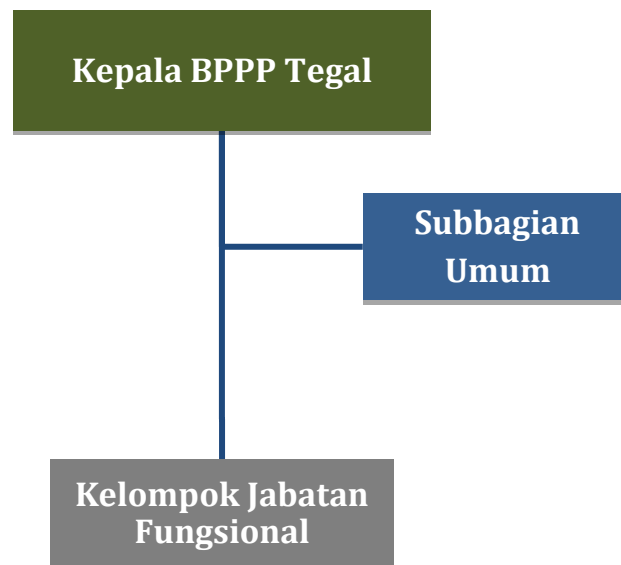
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Tegal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan;
- b. penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- h. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Struktur Organisasi

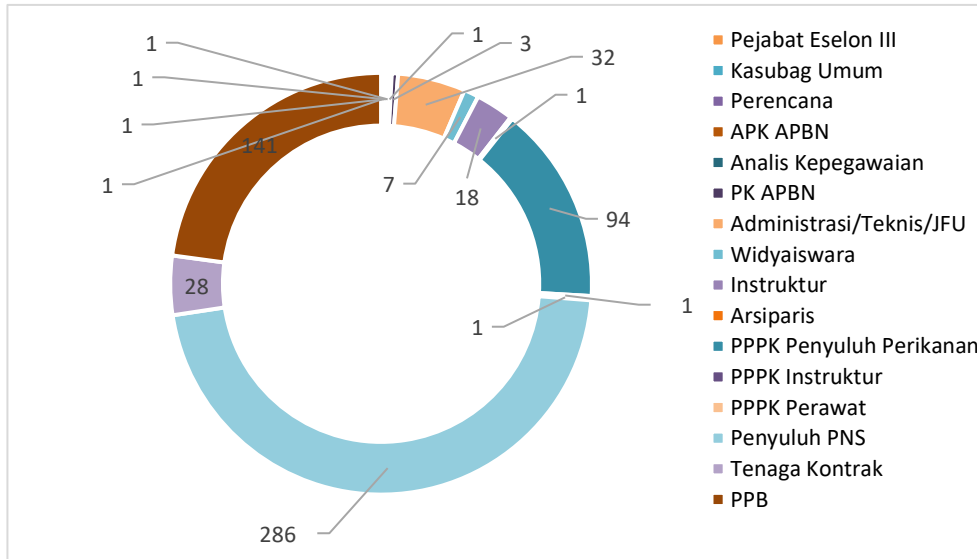
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Struktur Organisasi di BPPP Tegal dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Tegal

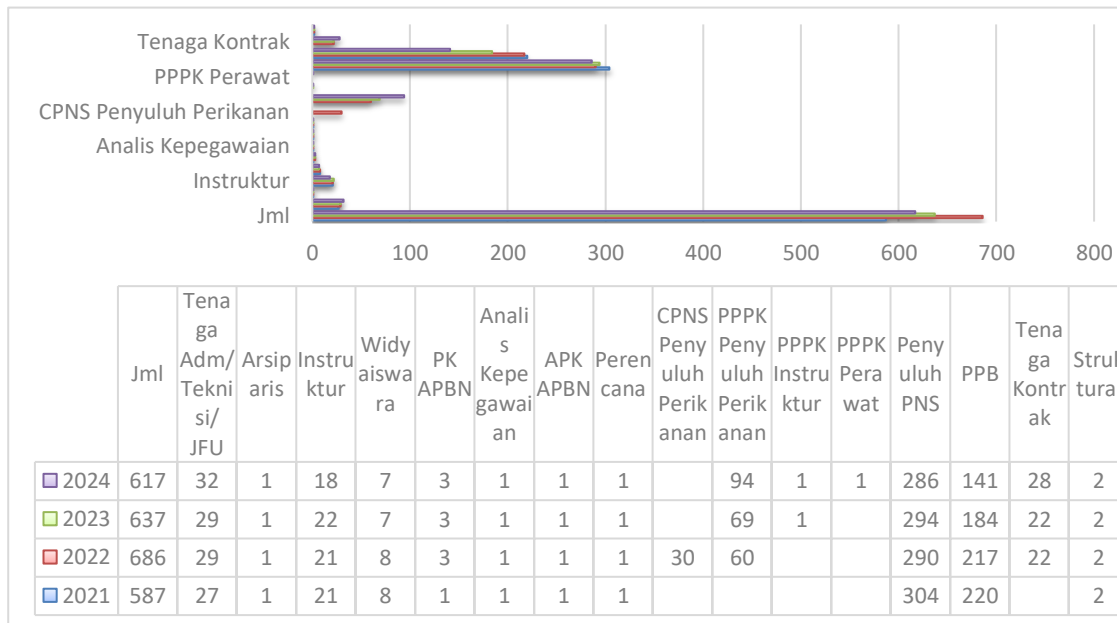
1.5. Keragaan SDM BPPP Tegal

Jumlah pegawai negeri sipil di BPPP Tegal per 1 April 2024 sebanyak 617 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut:



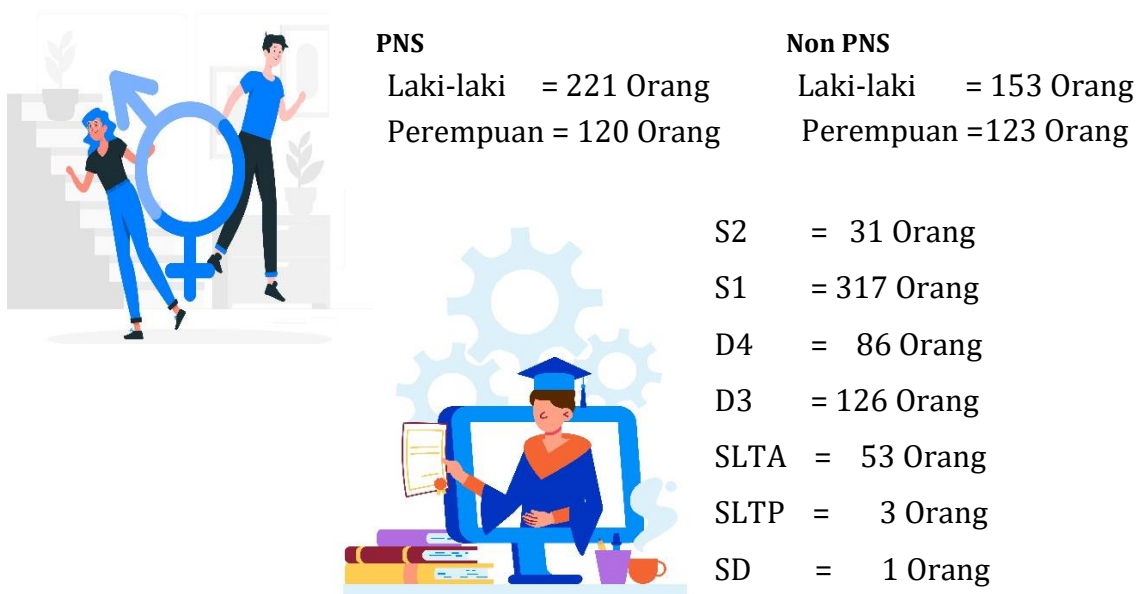
Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPP Tegal

Komposisi pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Komposisi Pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 4 Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

1.6. Potensi dan Permasalahan

1.6.1 Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 7 (tujuh) propinsi di No. Wilayah kerja BPPP Tegal yaitu propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta

masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

BPPP Tegal juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 4 (empat) provinsi meliputi provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. BPPP Tegal bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Tegal dalam mencapai tujuan organisasi:

1. Memiliki SDM yang ahli, profesional dan berpengalaman dibidangnya serta bersertifikasi yang berkomitmen kuat untuk berkembang dan memajukan diklat;
2. Memiliki sarpras diklat yang memadai dan representatif;
3. Penyelenggaraan *Basic Safety Training* (BST) dan *Basic Safety Training* Kapal Layar Motor (BST KLM);
4. Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 bidang Kelautan dan Perikanan yang telah di lisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK LSP Kelautan dan Perikanan;
5. Sebagai tempat kedudukan PUKAKP Wilayah V;
6. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015);
7. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran staf untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan mutu diklat;
8. Letak yang strategis berada pada jalur pantura Jawa, ditengah Kota Tegal dan berada pada lingkungan perikanan yang produktif;
9. Forum komunikasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta (bidang perikanan);
10. Kebutuhan tenaga kerja yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengikuti diklat;
11. Peningkatan kerjasama dengan instansi sejenis dan asosiasi industri/profesi;
12. Kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kediklatan di dalam dan luar negeri;

13. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas BPPP Tegal yang tersedia;
14. Indonesia telah meratifikasi STCW-F pada tahun 2019;
15. Permen KP No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
16. Beberapa diklat kepelautan masih dalam proses approval;
17. BPPP Tegal mampu menghasilkan produk perikanan yang layak dipasarkan.
18. BPPP Tegal mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas garam rakyat.
19. BPPP Tegal memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar.
20. BPPP Tegal mampu melakukan pelatihan daring yang memungkinkan peserta melakukan praktek dan dipandu langsung oleh pelatih.

1.6.2 Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Tegal memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain:

A. Aspek penyelenggaraan pelatihan KP antara lain:

1. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas;
2. Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
3. Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandar;
4. Kompetensi SDM BPPP Tegal perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan;
5. Kurangnya penerapan regulasi terhadap persyaratan kompetensi pekerja/calon pekerja di bidang kelautan dan perikanan.

B. Aspek penyelenggaraan penyuluhan antara lain:

1. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
2. Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
3. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam

aksesibilitasnya;

4. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
5. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
6. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia

1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Tegal Tahun 2024:

- 1) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- 6) Permen PAN-RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
- 7) Permen KP Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Berpedoman pada PerMenPAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut:

Kata Pengantar, memuat ungkapan rasa syukur, terima kasih dan pembuka laporan;

Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;

Bab I – Pendahuluan,

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Triwulan I Tahun 2024.

Bab III –Akuntabilitas Kinerja,

Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup,

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran,

Perjanjian kinerja, dan Lampiran yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINE

1.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) berkontribusi terhadap terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

1.1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong*”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BPPSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan*” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BPPSDM yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan*” untuk mewujudkan Indonesia

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Tegal pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BPPSDM, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

1.1.2 Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Tegal menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
- 4) Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

1.1.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

1.1.4 Sasaran Kegiatan

Renstra BPPP Tegal tahun 2020 – 2024 menjelaskan bahwa sasaran kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Tegal sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan.

Sasaran kegiatan program pelatihan dan penyuluhan KP yang dilaksanakan oleh BPPP Tegal adalah sebagai berikut:

SK.1 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan.

Pelatihan SDM KP diselenggarakan guna menjembatani kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama/pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%) dengan target indikator kinerja ini pada Tahun 2024 sebesar 72%.
- b) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih BPPP Tegal (Orang) ditargetkan sebanyak 17.960 orang pada Tahun 2024.

- c) Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Milyar) dengan target Tahun 2024 sebesar Rp.10.530.000.000,-

SK.2 Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya kompetensi SDM KP dengan tujuan utama pelatihan yang dilakukan oleh BPPP Tegal. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a) SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang). Indikator kinerja ini ditargetkan sebanyak 730 Orang pada Tahun 2024.

SK.3 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Kaji Widya/ Kajiterap yang dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut kaji terap dilakukan oleh para purnawidya/lulusan pelatihan untuk membentuk *startup* (usaha rintisan). Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang) dengan target indikator kinerja ini Tahun 2024 sebanyak 49 orang;

SK.4 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Penyuluhan KP dilaksanakan guna memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok) Tahun 2024 target indikator kinerja ini sebanyak 6.400 kelompok.
- b) Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok). Pada Tahun 2024 indikator kinerja ini ditargetkan sebanyak 255 kelompok.
- c) Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok). Pada Tahun 2024 target indikator kinerja ini sebanyak 511 kelompok.
- d) Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang) dengan target Tahun 2024 sebanyak 1.897 Orang.

SK.5 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Meningkatnya kompetensi SDM KP merupakan tujuan utama penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Tegal. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Tegal. Pada Tahun 2024 target indikator ini sebanyak 3 Desa.

SK.6 Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM KP. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit) Tahun 2024 target indikator kinerja ini sebanyak 2 unit.
- b) Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal (Unit) Tahun 2024 target indikator kinerja ini sebanyak 1 unit.

SK.7 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Tegal

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

- a) Presentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%), ditargetkan sebesar 100%.
- b) Nilai rekonsiliasi kinerja BPPP Tegal (Nilai), dengan target nilai sebesar 94.
- c) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target sebesar BPPP Tegal (%), dengan target 94%.
- d) Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal, ditargetkan indeks sebesar 81.
- e) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%), dengan target $\leq 0,5$
- f) Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%), dengan target 82%.
- g) Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai), dengan target Nilai 75
- h) Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai), dengan target Nilai 82

1.2. Strategi Pelaksanaan Program BPPP Tegal

Strategi pencapaian sasaran kegiatan pelatihan dan penyuluhan BPPP Tegal adalah sebagai berikut:

a) Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mensinergikan unit-unit kerja di BPPP Tegal sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dapat terlaksana dengan baik. Penempatan SDM yang tepat pada unit-unit kerja juga dapat berkontribusi dalam menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholder.

b) Ketenagaan

Tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam terlaksananya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang baik. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting untuk dilaksanakan. Peningkatan kualitas ketenagaan BPPP Tegal dapat dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya.

c) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan KP

Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Melalui monitoring dan evaluasi, kualitas penyelenggaraan kegiatan dapat dipantau dan diperbaiki jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

d) Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selain memenuhi kebutuhan stakeholder, kerjasama juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menambah daya jangkau kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang terbatas oleh wilayah kerja dan anggaran.

e) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPP Tegal masih belum sesuai standar penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana mutlak diperlukan guna menghasilkan purnawidya yang berkualitas.

1.3. Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Kegiatan, BPPP Tegal didukung dengan anggaran sebesar Rp 117.004.513.000,- yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2024

URAIAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.000)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				41,726,886
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				41,726,886
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih BPPP Tegal (Orang)	28,768,180
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	10.53
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	276,180
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	49
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	9,884,200
		7	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)	255

URAIAN	INDIKATOR		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.000)
	8	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	Kelompok	511	
	9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)	Orang	1,897	
5 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	Desa	3	600,000
6 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	11	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	Unit	2	1,998,326
	12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	Unit	1	200,000
Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan			Kajian	3	417,156
ABW.002. Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan			Kajian	3	417,156
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan			Orang	730	276,180
DCC.001. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi			Orang	730	276,180
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			Kelompok	6,401	10,484,200
QDD.001. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP			Kelompok	6,400	9,884,200
QDD.002. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan			Kelompok	1	600,000
Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			Unit	2	1,998,326
RAL.001. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			Unit	2	1,998,326

URAIAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.000)		
Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit	1	200,000		
RBQ.001. Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Unit	1	200,000		
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		Orang	17,960	28,351,024		
SCC.001. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih		Orang	17,960	28,351,024		
Program Dukungan Manajemen				75,277,627		
Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				75,277,627		
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	Persentase	100	74,893,171
		2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (Nilai)	Nilai	94	75,100
		3	Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	94	-
		4	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	indeks	81	-
		5	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%)	Persentase	≤ 0.5	-
		6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	Persentase	82	53,106
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	Nilai	75	

URAIAN	INDIKATOR		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.000)
	8	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	Nilai	82	256,250
Layanan Dukungan Manajemen Internal			Layanan	2	75,104,521
2378.EBA.962. Layanan Umum			Layanan	1	256,250
2378.EBA.994. Layanan Perkantoran			Layanan	1	74,848,271
Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen	4	173,106
2378.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran			Dokumen	1	44,900
2378.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi			Dokumen	2	75,100
2378.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan			Dokumen	1	53,106

1.4. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN & RB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
- 2) Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada *Logical Framework Analysis* (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Triwulan I Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 29 Desember 2023. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024.

Adapun indikator-indikator pada Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	17.960
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	10,530
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	730
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	49
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	6.400
		7	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)	255
		8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	511
		9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)	1.897
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas)	3
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	11	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal (Unit)	2
		12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Tegal	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (Nilai)	94
		15	Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK
		16	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	81
		17	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal dibandingkan realisasi anggaran BPPP Tegal TA 2022 (%)	≤0.5
		18	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	75
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	82

1.5. Pengukuran Kinerja

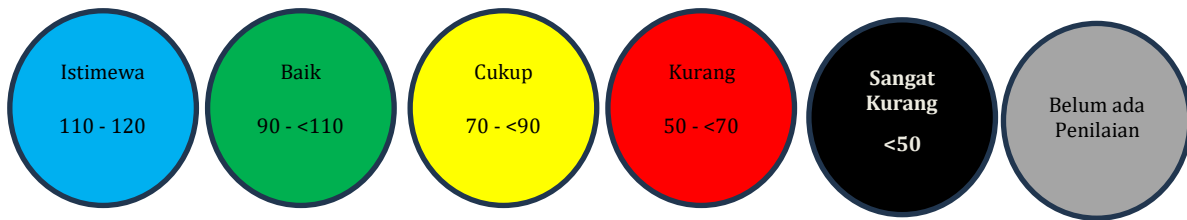
Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Capaian tersebut kemudian dilakukan penginputan data melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan menggunakan *Logical Framework Analysis (LFA)* adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek

1.5.1 Rumus Pengukuran

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

4) Adapun status indeks capaian IKU seperti tabel sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

1.5.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Tegal dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Tegal Nomor: B.381/SK/BPPP.TGL/KP.110/I/2024 tentang Tim Pengelola Kinerja BPPP Tegal Tahun 2024. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua kelompok di BPPP Tegal. Berdasarkan laporan sub koordinator penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan

BAB III

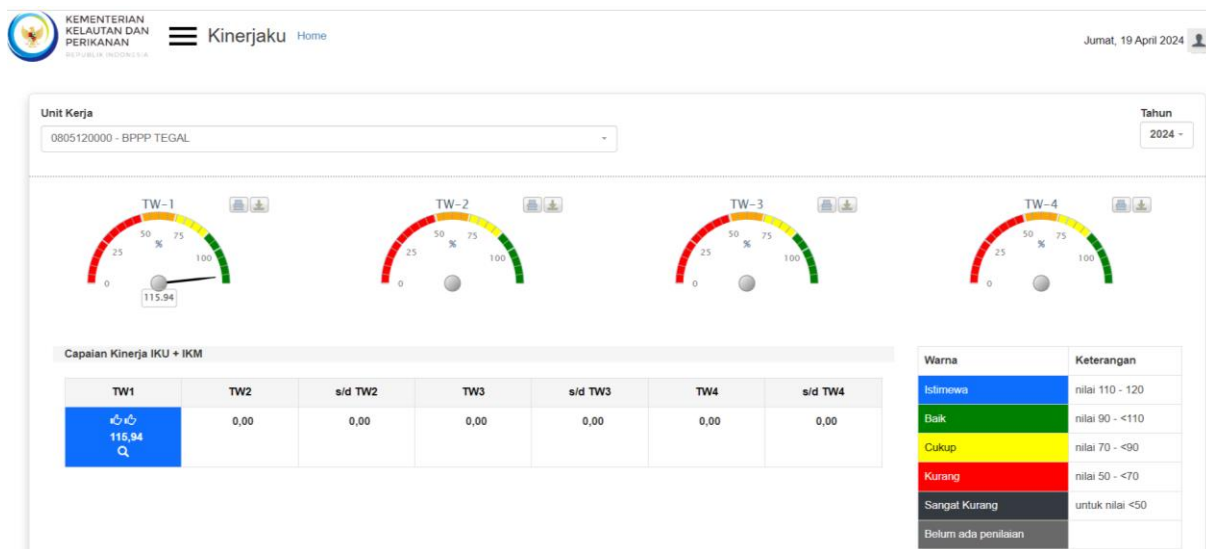
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja Indikator Utama sebesar 115.94%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Nilai Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2024 pada dashboard aplikasi kinerjaku.

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Tegal yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2024 BPPP Tegal memiliki kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Target TW I	Realisasi	
						Tahun 2024	
						Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	72	-	-	-
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	17.960	5.000	8.015	120 (160,3)
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	10,53	1,58	2,97	120 (187,97)
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	730	33	324	120 (981,82)
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	49	-	-	-
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan	6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	6.400	150	155	103,33

	Perikanan	7	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)	255	-	-	-
		8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	511	10	17	120 (170)
		9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)	1.897	-	-	-
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas)	3	-	-	-
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	11	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal (Unit)	2	-	-	-
		12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)	1	-	-	-
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	20	33,33	120 (165,65)
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (Nilai)	94	-	-	-
		15	Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	106,94	113,77
		16	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	81	-	-	-
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%)	≤ 0,5	-	-	-
		18	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	82	82	80	97,56
		19	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	75	-	-	-
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	82	-	-	-

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

BPPP Tegal berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi KKP, selaras dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam menjalankan misi Presiden dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Sesuai Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset kelautan dan perikanan.

Salah satu penjabaran misi tersebut adalah dengan menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, BPPP Tegal didukung oleh indikator kinerja utama antara lain (1) Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal dan (2) Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Tegal.

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)

Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan melalui pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat/pelatihan agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri.

IKU 1 Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%) merupakan persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia usaha dunia industri (DUDI) atau wirausaha KP dibandingkan dengan jumlah total lulusan pelatihan masyarakat yang diselenggarakan Tahun 2024.

Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal diukur dengan menghitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan

menerapkan hasil pelatihannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih. Indikator ini belum dapat diukur pencapaiannya karena pengukuran dilakukan secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama 2

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Tegal (orang)

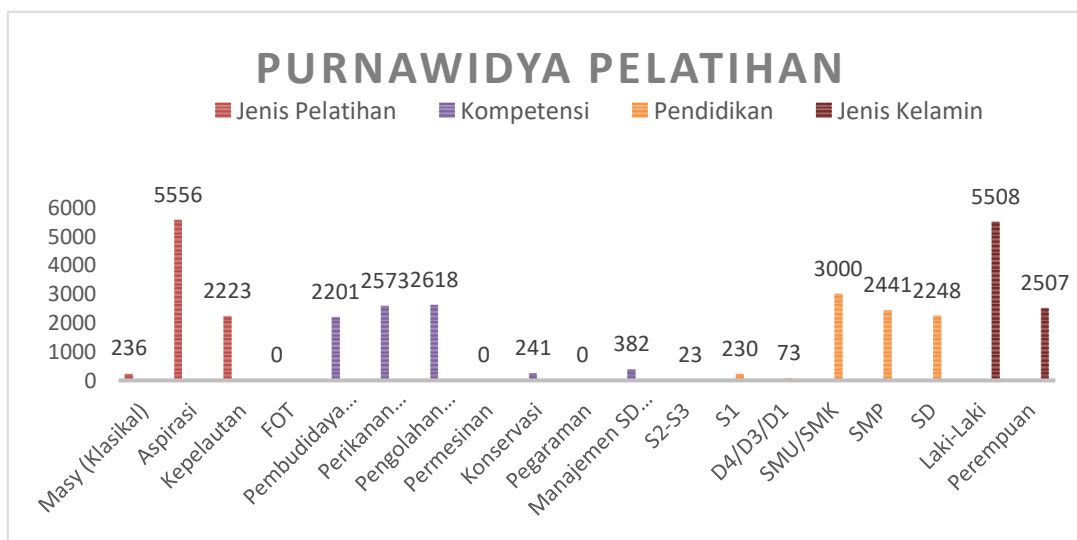
Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

IKU 2 Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Tegal merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria: Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan reguler klasikal (full tatap muka), model *Blended* (kombinasi *online* dan tatap muka) dan *Full Online Training* serta pelatihan keahlian kepelautan. Peserta pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pelatihan. Indikator ini diukur dengan akumulasi jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria pelatihan. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Tegal

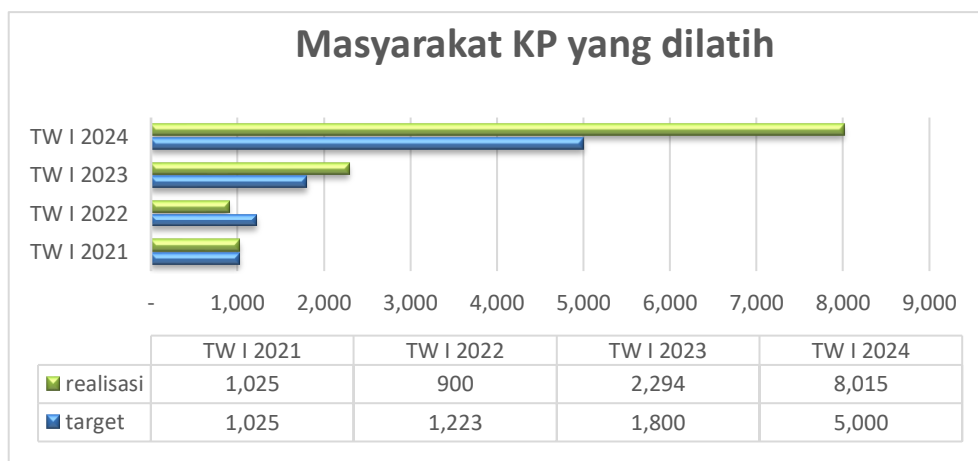
SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan									
IKU 2. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Tegal (orang)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1,025	1,223	2,294	17,960	5,000	8,015	120 (160.30)	249.39	20,000	40.08

Dari tabel diatas dapat dilihat target tahunan indikator ini sebanyak 17.690 Orang sedangkan target Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 5.000 Orang dan telah terealisasi capainnya sebanyak 8.015 orang atau tercapai sebesar 120 (160,30)%. Purnawidya pelatihan masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan jenis pelatihan, kompetensi, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Grafik Purnawidya Pelatihan Masyarakat berdasarkan Jenis Pelatihan, Kompetensi, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan target sebesar 345,28% sehingga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Perbandingan Capaian IKU 2 dengan tahun sebelumnya

Dari data diatas dapat dilihat pencapaian target pelatihan setiap tahun mengalami peningkatan karena potensi BPPP Tegal dan permintaan dari stakeholder dalam penyelenggaraan pelatihan, selain hal tersebut pada awal 2022 BPPP Tegal telah menjadi unit kerja dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Jika dibandingkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan target Renstra BPPP Tegal 2020-2024 untuk indikator ini telah tercapai sebesar 40,08% dari target sebesar 20.000 orang pada tahun 2024. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 2 Masyarakat KP dilatih dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	5000	8015	120 (160,30)
2	BPPP Medan	1780	1828	102,70
3	BPPP Banyuwangi	4000	4511	100,24
4	BPPP Bitung	1528	1910	120
5	BPPP Ambon	1400	1444	103

Adapun Faktor Penyebab keberhasilan untuk kegiatan ini antara lain:

- a. Adanya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP.
- b. Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun, jika terdapat pergeseran, segera dilakukan koordinasi untuk penyesuaian jadwal pelatihan kembali sehingga pelaksanaan sesuai target yang telah ditetapkan.
- c. Tersedianya database penyelenggaraan dan purnawidya pelatihan dengan baik melalui aplikasi SimlatluhKP.

Efisiensi penggunaan sumberdaya bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat dilakukan oleh widyaiswara/instruktur serta dibantu oleh penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu BPPP Tegal, selain itu efisiensi sumberdaya dalam anggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara *blended* sehingga meminimalisir penganggaran kegiatan. Adapun kegiatan Penunjang antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) sehingga dapat mengemas kegiatan pelatihan lebih menarik.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelatihan, sebagai unit kerja BLU BPPP Tegal diberikan fleksibilitas dalam memanfaatkan aset, sehingga untuk mendukung hal tersebut BPPP Tegal melakukan pemanfaatan aset secara maksimal dalam mendukung pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPP Tegal.

Indikator Kinerja Utama 3

Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal (Rupiah Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBPN: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN
- c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan

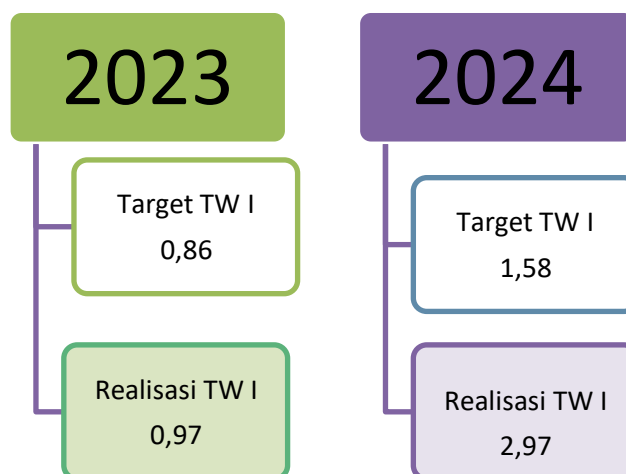
Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

IKU 3 Nilai PNBP Satker BPPP Tegal Tahun 2024 dengan target tahunan yang ditetapkan adalah Rp. 10.530.206.000. Adapun capaian sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian IKU 3 Nilai PNBP Satker BPPP Tegal

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan									
IKU 3. Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Milyar)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0.52	0.98	10.53	1.58	2.97	120 (187.97)	203.06	-	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target tahunan indikator nilai PNBP Satker BPPP Tegal sebesar Rp. 10.530.206.000,-, sedangkan Target Triwulan I sebesar Rp 1.580.000.000 dan telah terrealisasi Rp. 2.966.418.368,- atau sebesar 120(187,97)% jumlah tersebut termasuk bunga bank dalam rekening penerimaan PNBP. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan sebesar 6,329% seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8 Perbandingan Capaian PNBP dengan tahun Sebelumnya

Dari gambar diatas dapat dilihat indikator ini mengalami peningkatan target yang signifikan di Triwulan I Tahun 2024, hal tersebut didasari oleh telah ditetapkannya BPPP Tegal sebagai unit kerja Badan Layanan Umum, dimana target tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai pembina unit BLU. Indikator ini belum terdapat pada target Renstra BPPP Tegal 2020-2024, sehingga indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target renstra. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 3 Nilai PNBP dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	1,58	2,97	120 (187,97)
2	BPPP Medan	0,06	0,09	120 (150)
3	BPPP Banyuwangi	0,10	0,54	120 (540)
4	BPPP Bitung	0,11	0,13	114,55
5	BPPP Ambon	0,02	0,08	120

Analisis keberhasilan indikator ini adalah penetapan BPPP Tegal sebagai satker dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum menjadi pendorong keberhasilan indikator ini dengan melakukan optimalisasi aset guna meningkatkan PNBP melalui mekanisme Kerja Sama Operasional/Manajemen. Peningkatkan pelayanan dan optimalisasi aset serta melakukan peremajaan fasilitas yang lebih modern untuk menunjang kegiatan pelatihan dan penyuluhan sesuai standar yang berlaku, selain hal tersebut perlu dikembangkan sistem penerimaan PNBP melalui sistem sehingga memudahkan dan dapat dipantau secara langsung. Faktor penunjang keberhasilan indikator ini adalah telah dilaksanakan kegiatan kerja sama operasional/manajemen dari aset dan layanan yang ada di BPPP Tegal, selain itu didukung dengan kegiatan promosi baik secara langsung maupun melalui media sosial.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Dalam mewujudkan tujuan pelatihan kelautan dan perikanan yang menghasilkan SDM profesional melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi agar meningkatkan produksi dan produktivitas. Untuk mendukung tujuan tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 4

SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)

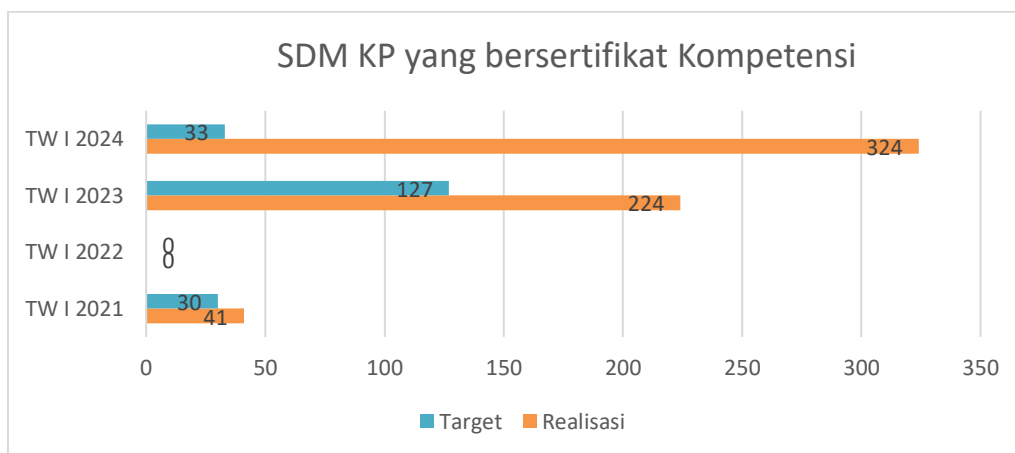
IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Pengukuran indikator ini adalah dengan menghitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Tegal. Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)

SK. 2 Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan									
IKU 4. Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
41	0	224	730	33	324	120 (981.82)	44.64	3,000	10.80

Target Tahunan indikator Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal sebanyak 730 Orang sedangkan Target Triwulan I Tahun 2024 indikator ini ditargetkan 33 orang dan telah terrealisasi outputnya sebanyak 324 orang atau sebesar 120 (981,82)% dengan bidang kompetensi budidaya ikan sebanyak 54 Orang, bidang kompetensi penangkapan ikan sebanyak 229 orang, serta bidang kompetensi manajemen sebanyak 41

orang. Output Capaian indikator ini diperoleh dari peserta ujian ANKAPIN III/ATKAPIN III dan peserta uji keahlian profesi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi masing-masing bidang kompetensi. Peserta yang mengikuti ujian ini dan dinyatakan lulus dibuktikan sertifikat. Untuk sertifikat yang belum terbit dikeluarkan surat keterangan lulus oleh Kepala Balai dilampirkan Berita Acara pelaksanaan ujian. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator ini mengalami peningkatan realisasi sebesar 44,64%, perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9 Perbandingan Capaian SDM KP yang bersertifikasi kompetensi

Dari data diatas dapat dilihat peningkatan target dan capaian indikator ini yang disebabkan oleh peningkatan layanan yang mendukung BPPP Tegal sebagai satker badan layanan umum. Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis BPPP Tegal 2020-2024 indikator ini telah tercapai sebanyak 324 Orang atau telah tercapai 10,80% dari target renstra sebanyak 3.000 orang. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	33	324	981.82
2	BPPP Medan	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	1	30	100
4	BPPP Bitung	0	0	0
5	BPPP Ambon	0	0	0

Faktor keberhasilan untuk indikator ini adalah adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi pelatih sehingga dapat meningkatkan kualitas pelatihan yang dilaksanakan. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh widyaiswara dan instruktur BPPP Tegal sebagai pelatih/asesor.

Adapun kegiatan penunjang untuk indikator ini adalah menyediakan sarana dan prasarana kompetensi yang mendukung, asesor yang tersertifikasi, lokasi BPPP Tegal yang strategis, kegiatan promosi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan Kelautan dan Perikanan

BPPP Tegal selain sebagai penyelenggara pelatihan juga mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan guna meningkatkan kompetensi, kewirausahaan serta manajemen bagi pelatih dan peserta latih. Untuk mendukung tujuan tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 5

Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)

Meningkatkan kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Tegal. IKU 5 Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Tegal merupakan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital).

IKU Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) diukur dengan menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Pada Triwulan I Tahun 2023 target indikator ini belum dapat diukur pencapaiannya, karena pengukuran dilakukan secara tahunan.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Salah satu tujuan BPPSDMKP dalam mendukung visi Kementerian adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal.

BPPSDMP KP sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP. Untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 6

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (kelompok)

IKU 6 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal merupakan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan.

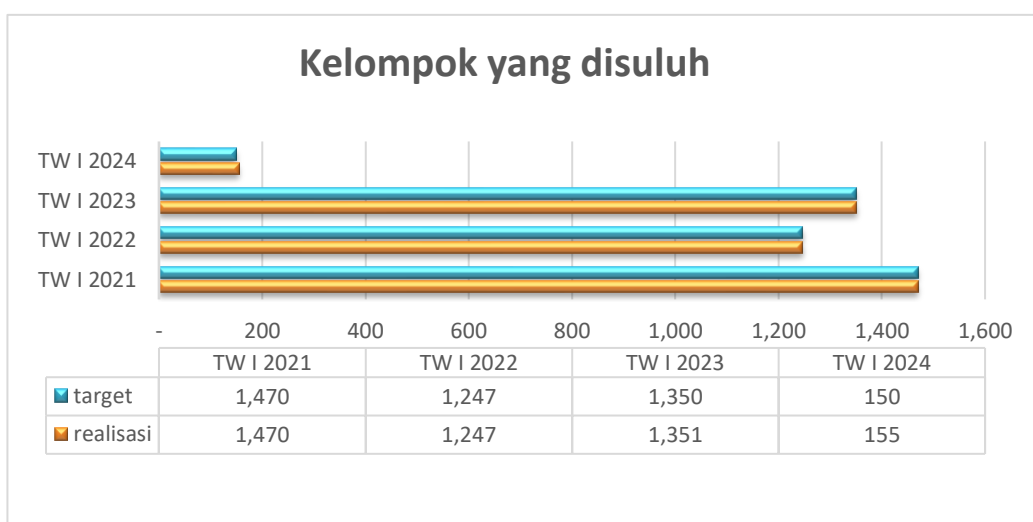
Indikator kinerja kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal diukur dengan menghitung jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan. Target IKU 6 pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 150 kelompok yang disuluh di BPPP Tegal sebagaimana data ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 18. Capaian IKU 6 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)

SK. 4 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IKU 6. Jumlah Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1,470	1,247	1,351	6,400	150	155	103.33	-88.53	7,903	1.96

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh BPPP Tegal di targetkan pada Tahun 2024 sebanyak 6.400 kelompok sedangkan Target Triwulan I sebanyak 150 kelompok dan telah tercapai sebanyak 155 kelompok atau sebesar 103,33%. Dengan kriteria sebanyak 128 kelompok pemula dan 27 kelompok madya.

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP tegal dengan tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan sebesar sebesar 88,53% atau dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10 Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh dengan tahun sebelumnya

Dari tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi kelompok disuluh di BPPP Tegal mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena adanya peralihan penyuluh PNS dan PPPK ke satminkal lain (BRBATPP Bogor dan BPPP Banyuwangi) sehingga tersisa capaian kelompok yang disuluh dari penyuluh PPB. Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 1,96% dari jumlah 7.903 kelompok pada tahun 2024. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 19. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 6 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	150	155	103,33
2	BPPP Medan	400	480	120
3	BPPP Banyuwangi	2200	2549	115,86
4	BPPP Bitung	350	420	120
5	BPPP Ambon	400	600	120

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja sejenis. Adanya peralihan penyuluh PNS ke satminkal lain, menjadikan BPPP Tegal hanya memiliki penyuluh bantu atau pppk dengan jumlah yang lebih sedikit, sehingga memiliki target dan output lebih kecil dibandingkan balai lain.

Faktor Keberhasilan untuk indikator ini adalah adanya Peraturan Kepala BPPSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia dalam kegiatan ini yaitu penyuluhan dilakukan oleh penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan bantu yang ditempatkan pada lokasi masing-masing, sehingga kegiatan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini adalah melaksanakan koordinasi antara penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok binaan serta memfasilitasi kelompok dalam mendapatkan akses permodalan, akses pasar, akses iptek dan

meningkatkan PKS kelompok melalui sosialisasi baik peraturan atau teknologi informasi terkini dibidang perikanan.

Indikator Kinerja Utama 7

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (kelompok)

IKU 7 Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya Satminkal BPPP Tegal (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. IKU 7 ini diukur dengan menghitung kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan. Tahun 2024 kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (kelompok) ditargetkan sebanyak 255 kelompok. Pada Triwulan I Tahun 2023 target indikator ini belum dapat diukur pencapaiannya, karena pengukuran dilakukan secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama 8

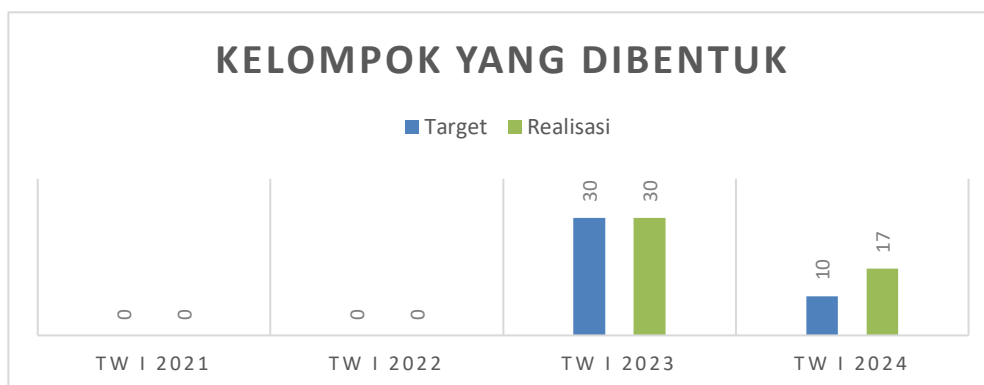
Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (kelompok)

IKU 8 Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di Tegal (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. IKU 8 Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di Tegal (kelompok) diukur dengan menghitung jumlah kelompok Pelaku utama KP yang dibentuk dan termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok.

Tabel 22. Capaian IKU 8 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)

SK. 4 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IKU 8. Jumlah Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	30	511	10	17	170	-43.33	300	5.67

Tahun 2024 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (kelompok) ditargetkan sebanyak 511 kelompok sedangkan Target Triwulan I sebanyak 10 kelompok telah terealisasi sebanyak 17 kelompok atau 170%. Dengan bidang usaha budidaya berjumlah 4 kelompok, penangkapan ikan 10 kelompok, pengolahan/pemasaran 3 kelompok. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dari gambar berikut:



Gambar 12 Perbandingan Capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya

Dari gambar diatas terlihat bahwa tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena adanya peralihan penyuluh PNS dan PPPK ke satminkal lain (BRBATPP Bogor dan BPPP Banyuwangi) sehingga tersisa capaian kelompok yang disuluh dari penyuluh PPB.

Jika dibandingkan capaian indikator ini dengan target pada Rencana Strategis BPPP Tegal Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 5,67% dari jumlah 300 kelompok pada

tahun 2024. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 8 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	10	17	120 (170)
2	BPPP Medan	50	60	120
3	BPPP Banyuwangi	40	70	120 (175)
4	BPPP Bitung	10	15	120
5	BPPP Ambon	5	10	120

Faktor penyebab Keberhasilan untuk indikator ini adalah adanya Peraturan Kepala BPPSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu dan tersedianya Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya terdapat efisiensi sumberdaya manusia bahwa kegiatan ini melibatkan aparat desa, pelaku utama dan usaha KP, masyarakat dan penyuluh.

Adapun Kegiatan Penunjang IKU ini adalah melaksanakan pendampingan oleh penyuluh terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya serta mamfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama 9

Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan,

pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BPPP Tegal diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Tenaga kerja yang terlibat pada UMKM, Koperasi Sektor KP, Korporasi Sektor KP yang disuluh dan P2MKP, Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV. Indikator Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Tegal tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.897 Orang. Indikator ini tidak memiliki target triwulan karena pengukuran dilakukan secara tahunan.

SASARAN KEGIATAN 5

Terselenggaranya Percontohan Kelautan dan Perikanan

Misi pertama BPPSDM yaitu Peningkatan Kualitas Manusia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Salah satu penjabaran misi tersebut adalah dengan menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 10

Desa/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014).

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna. Teknologi merupakan materi konkret (*hard atau soft*) pengetahuan untuk penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya.

Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK KP di BPPP Tegal merupakan desa komunitas KP yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. Diukur dengan menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan Tahun 2024 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota. Iptek yang terdesiminasi merupakan hasil riset teknologi KP dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berupa kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan, dan penyuluhan KP yang sinergi dengan diseminasi Iptek KP.

Tahun 2024 target indikator ini adalah 3 (tiga) desa perikanan cerdas yaitu SFV Panembangan di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan SFV Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan 1 Desa baru yang masih tahap survey. Indikator ini tidak memiliki target triwulan, sehingga belum dapat diukur capaian kinerjanya.

SASARAN KEGIATAN 6

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM KP diperlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar yang ada. Sasaran Strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 11

Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal (unit)

IKU 11 Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal didefinisikan sebagai Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDM. IKU 11 diukur dengan menghitung sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal. Tahun 2024 target indikator ini adalah 2 Unit dengan pengukuran capaian tahunan, sehingga sampai dengan triwulan ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama 12

Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal (unit)

IKU 12 Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal merupakan Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDM. IKU 12 diukur dengan menghitung jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Tahun 2024 target indikator ini adalah 1 Unit pengukuran capaian dilakukan secara tahunan.

SASARAN KEGIATAN 7

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Terpenuhinya layanan dukungan manajemen Eselon I dan Satker, BPPP Tegal mendukung tatakelola pemerintah yang baik, dengan melakukan pendokumentasian sebagai bukti pelaksanaan dan pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan. Untuk mewujudkan hal tersebut didukung dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 13

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

IKU 13 persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal dan layanan perkantoran. IKU 13 diukur dengan formulasi sebagai berikut:

- 1) Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- 2) Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (ditandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan
- 3) Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, *screen shoot* aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Dokumen dukung layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Laporan Kinerja	
	a. Triwulan 1	1
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	
2	Dokumen Perencanaan Anggaran	1
3	Rencana Kerja Tahunan	1
4	Laporan Survey Kepuasan Pelanggan	
	a. Triwulan 1	1
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	
5	Laporan Keuangan	
	a. Semester I	
	b. Semester II (Tahunan)	
6	Laporan Barang Milik Negara (BMN)	
	a. Semester I	
	b. Semester II (Tahunan)	
7	Matrik Laporan SPIP	
	a. Triwulan 1	1
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	
8	Matrik Laporan Manajemen Risiko (MR)	
	a. Triwulan 1	1
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	
9	Laporan Weekly Report (Bulan)	3
10	Laporan Tahunan	
11	Prinscreen Aplikasi (Triwulan)	
	a. Kinerjaku	1
	b. SMART- DJA	1
	c. Bappenas E-Monev	1
	d. OMSPAN	1
Jumlah Dokumen		13

Adapun capaian IKU 13 persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Capaian IKU 13 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

SK. 7 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
IKU 13. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
43.75	25	30.77	100	20	33.33	120 (166.65)	8.32	100	33.33

A. Capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Indikator persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal pada Triwulan I Tahun 2024 ditargetkan 20% dan terealisasi 33,33%. Adapun daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 34. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen	Link Dokumen
1	Perjanjian Kinerja	1	1	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UOEKsqbl3GZC2JBs1thd-mWLMujW03_J
2	Manual IKU	1	1	
3	Laporan Kinerja			
	a. Triwulan 1	1	1	
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		
	d. Tahunan	1		
4	Dokumen Perencanaan Anggaran	1	1	
5	Rencana Kerja Tahunan	1	1	

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen	Link Dokumen
6	Laporan Survey Kepuasan Pelanggan			https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UOEKsqbl3GZC2JBs1thd-mWLMujW03_J
	a. Triwulan 1	1	1	
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		
	d. Tahunan	1		
7	Laporan Keuangan			
	a. Semester I	1		
	b. Semester II (Tahunan)	1		
8	Laporan Barang Milik Negara (BMN)			
	a. Semester I	1		
	b. Semester II (Tahunan)	1		
9	Matrik Laporan SPIP			
	a. Triwulan 1	1	1	
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		
	d. Tahunan	1		
10	Matrik Laporan Manajemen Risiko (MR)			
	a. Triwulan 1	1	1	
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		
	d. Tahunan	1		
11	Laporan Weekly Report (Bulan)	12	3	
12	Laporan Tahunan (Program dan Kegiatan)	1		
13	Prinscreen Aplikasi (Triwulan)			
	a. Kinerjaku	1	1	
	b. SMART- DJA	1	1	
	c. Bappenas E-Monev	1	1	
	d. OMSPAN	1	1	
Jumlah Dokumen		39	13	
			33.33	
%				

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan tahun sebelumnya indikator ini memiliki data capaian lebih banyak, yaitu terdiri dari 13 dokumen atau tercapai 33,33% dari target tahunan, sedangkan tahun sebelumnya 12 dokumen dengan capaian 30,77% dari target tahunan sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan persentase capaian pada indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Renstra BPPP Tegal

Jika dibandingkan dengan target renstra BPPP Tegal 2020-2024 indikator ini telah tercapai sebesar 33,33% dari target renstra tahun 2024.

D. Faktor penyebab Keberhasilan

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan dan data dukung serta dalam melakukan penginputan data capaian.

E. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumberdaya bahwa dalam pencapaian kegiatan ini didukung oleh SDM BPPP Tegal yang telah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan sesuai bidang dan didukung dengan sistem pelaporan melalui aplikasi.

F. Kegiatan Penunjang

Melakukan rapat dalam rangka pemenuhan data dukung/laporan, sehingga setiap penanggungjawab dapat menyiapkan data secara tepat waktu.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 36. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 13 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	20	33,33	120 (166,65)
2	BPPP Medan	25	25	100
3	BPPP Banyuwangi	15	30	100
4	BPPP Bitung	25	31,66	120
5	BPPP Ambon	25	25	103,88

Indikator Kinerja Utama 14

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (nilai)

IKU 14 rekonsiliasi kinerja BPPP Tegal merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. IKU 14 diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jenis Dokumen yang dibutuhkan		Keterangan
1	Perjanjian Kinerja*	Revisi terakhir jika ada
2	Manual IKU	Revisi terakhir jika ada
3	Rincian Target IKU*	Revisi terakhir jika ada
4	Rencana Aksi*	Khusus level 2
5	LKJ/LCK Triwulan I*	LCK bisa diambil pada aplikasi kinerjajaku
6	LKJ/LCK Triwulan II*	
7	LKJ/LCK Triwulan III*	
8	Data dukung LKJ/LCK Tw III	Cek per IKU

Keterangan:
* Dokumen ditandatangani

Nilai Aspek Kepatuhan = Bobot 30% X Nilai total dokumen

Nilai Total Dokumen = $\frac{\text{dokumen yang ada}}{\text{total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$

Contoh perhitungan:
Dokumen yang ada hanya bisa dilengkapi 7 dokumen
Nilai total dokumen = $(7 / 8) \times 100 = 87,5$
Nilai aspek kepatuhan = $30\% \times 87,5 = 26,25$
Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kepatuhan sebesar 26,25

Kesesuaian Data dan Informasi		Kesesuaian Target		Kesesuaian Realisasi	
Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max
PK ↓ Manual IKU	1 (A)	PK ↓ LKJ/LCK TW III	1 (E)	LKJ/LCK TW III ↓ KinerjaJaku	1 (H)
PK ↓ Rincian Target IKU	1 (B)	PK ↓ KinerjaJaku	1 (F)		
PK ↓ Rencana Aksi	1 (C)	LKJ/LCK TW III ↓ KinerjaJaku	1 (G)		
Rincian Target ↓ KinerjaJaku	1 (D)				

Nilai Aspek Kesesuaian = Bobot 30% X Rata-rata Kesesuaian

Rata-rata Kesesuaian = $\frac{A+B+C+D+E+F+G+H}{8} \times 100$

Contoh perhitungan:
Nilai perbandingan (A-H) yang diperoleh mendapat skor 7,8
Rata-rata kesesuaian = $(7,8 / 8) \times 100 = 97,5$
Nilai aspek kesesuaian = $30\% \times 97,5 = 29,25$
Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kesesuaian sebesar 29,25

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

- 1) Aspek Kepatuhan (A-I): Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU,

Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III

- 2) Aspek Kesesuaian (A-II): Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
- 3) Aspek Ketercapaian (A-III): Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjajaku

Nilai Capaian IKU + IK Tw I	Nilai Capaian IKU + IK Tw II	Nilai Capaian IKU + IK Tw III
99,00 (A)	102,00 (B)	103,00 (C)

Nilai Aspek Ketercapaian = Bobot
 $40\% \left(\frac{\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK}}{120} \times 100 \right)$

Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK = $\frac{A+B+C}{3} \times 100$

Contoh perhitungan:
 Nilai Capaian IKU + IK yang diperoleh Tw I: 99, Tw II: 102, Tw III: 103
 Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK = $(99+102+103) / 3 = 101,33$
 Nilai aspek ketercapaian = $40\% \times ((101,33 / 120) \times 100) = 33,78$
 Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek ketercapaian sebesar 33,78

- 4) Aspek Ketepatan Aspek Ketepatan, diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-Sakip Reviu.
 - a) Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

ASPEK KEPATUHAN (30%)	ASPEK KESESUAIAN (30%)	ASPEK KETERCAPAIAN (40%)
A-I	A-II	A-III
SKOR NILAI UNIT = A-I + A-II + A-III = XX,XX		

SKALA	
0 - 50	BURUK
>50 - 75	KURANG
>75 - 85	CUKUP
>85 - 90	BAIK
>90 - 100	SANGAT BAIK

Pengukuran capaian kinerja indikator nilai rekonsiliasi kinerja BPPP Tegal dilakukan secara tahunan dengan target nilai sebesar 94, sampai dengan triwulan ini belum dapat diukur capaiannya.

Indikator Kinerja Utama 15

Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar (%)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan, pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan mungkin ada di dalam kepala masing-masing individu dalam organisasi. Manajemen Pengetahuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya: pengetahuan dan pengalaman yang ada, sehingga dapat dicapai suatu organisasi yang efektif dan efisien.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman <http://kinerjakkp.bitrix24.com> namun pada Tahun 2024 pengukuran indikator ini diubah menggunakan sistem internal dari kkp yaitu <https://portal-sso.kkp.go.id/>.

Penghitungan nilai manajemen pengetahuan yang terstandar berdasarkan variabel komponen dan pembobotan sebagai berikut:

1. Menggunakan Aplikasi <portal.kko.go.id>
2. Pengukuran dilakukan triwulan III dan IV dengan target yang telah ditetapkan;
3. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan;
4. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam suatu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan

5. Pembobotan yang dimaksud antara lain:

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/desiminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapat poin 0,5
- Infografis adalah Kumpulan visualisasi, grafik dan sedikit teks. Semua itu dirangkai untuk memudahkan pemahaman audiens akan suatu topik, mendapat poin 1
- Konten berupa karya tulis, jurnal, konten video campaign bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3

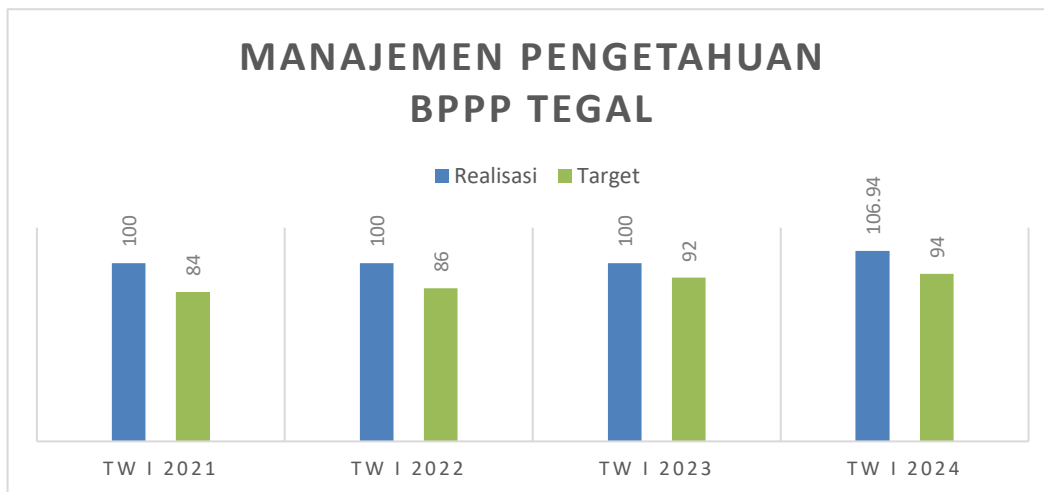
Capaian IKU 15 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Capaian IKU 15 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar BPPP Tegal (%)

SK. 7 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
IKU 15. Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar (%)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
100	100	100	94	94	106.94	113.77	6.94	90	118.82

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 telah tercapai 106,94% atau sebesar 113,77% dari target yang ditetapkan sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan sebesar 6,94%, hal ini menunjukkan bahwa BPPP Tegal telah memenuhi seluruh variabel komponen penilaian manajemen pengetahuan.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 13 Perbandingan IKU Manajemen Pengetahuan dari tahun sebelumnya

Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2024 dengan target renstra BPPP Tegal indikator persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar BPPP Tegal ditargetkan 90% sehingga perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra BPPP Tegal adalah sebesar 118,82 %. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 38. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersandar dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	94	106,94	113,77
2	BPPP Medan	94	106,94	113,77
3	BPPP Banyuwangi	94	106,94	113,77
4	BPPP Bitung	94	106,94	113,77
5	BPPP Ambon	94	106,94	113,77

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja sejenis dimana capaian BPPP Tegal memiliki capaian realisasi sama dengan balai lain. Faktor penyebab keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari seluruh variabel komponen

terhadap penilaian MP telah terpenuhi oleh para pejabat/pelaksana dalam mendukung keberhasilan indikator ini. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya terdapat efisiensi sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaan melibatkan keaktifan pejabat dan pelaksana melalui kegiatan yang dipublish serta sharing dokumen pendukung yang dibagikan pada aplikasi <http://kinerjakkp.bitrix24.com> dan <https://portal-sso.kkp.go.id/>. Adapun kegiatan penunjang IKU ini adalah menyediakan jaringan internet yang memadai sehingga memudahkan upload kegiatan serta memaksimalkan pejabat dan pelaksana untuk melakukan postingan kegiatan-kegiatan BPPP Tegal secara berkala dan update sharing dokumen perencanaan melalui <http://kinerjakkp.bitrix24.com> dan <https://portal-sso.kkp.go.id/>.

Indikator Kinerja Utama 16

Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas pekerjaan. IKU 17 Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa variabel pembentuk dan bobot sebagai berikut:

- a. **Kualifikasi (25%)** dihitung dari kondisi pendidikan terkini dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. **Kompetensi (40%)** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, misalkan Pejabat Eselon IV Tidak Pernah

melaksanakan Diklatpim Tingkat IV maka pegawai tersebut nilainya 0;

- Diklat Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 5 tahun terakhir, apabila dalam kurun waktu tersebut Pernah melaksanakan diklat dan seminar maka nilai kompetensi pegawai tersebut yaitu 15 dan 10 untuk Struktural dan Jabfung serta 22,5 dan 17,5 untuk staf ;

c. **Kinerja (30%)** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP dan di kolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP);

d. **Disiplin (5%)** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Pengukuran komponen kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai meliputi pendidikan S3, S2, S1/D4, D3, D1, SLTA, SLTP dan SD. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Konferensi/setara. Untuk komponen kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Sedangkan komponen disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami seperti: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, ringan maupun berat. IKU indeks profesionalitas ASN BPPP Tegal akan dilakukan penilaian pada semester I (triwulan II) dan semester II (triwulan IV).

Indikator Kinerja Utama 17

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%)

IKU 17 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%) merupakan indikator nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Temuan dimaksud

adalah temuan yang bersifat Tuntunan Ganti Rugi (TGR), yang menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 (enam puluh) hari.

Teknik penghitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Batas Tertinggi} = \frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2022}}{\text{Realisasi Riil TA 2022}} \times 100\%$$

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 (*audited*) tidak melebihi $\leq 1\%$ dari total realisasi anggaran BPPP Tegal Tahun 2022.

Indikator ini belum dapat diukur capaiannya, karena pengukuran dilakukan secara tahunan dengan target tahunan adalah ≤ 0.5 .

Indikator Kinerja Utama 18

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dari hasil Audit, Reviuw dan Evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran) ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Tabel 42. Capaian IKU 18 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)

SK. 7 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
IKU 18. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)									
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2023			2024					Renstra BPPP Tegal	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	100	75	82	82	80	97.56	6.67	-	-

Berdasarkan tabel diatas hasil capaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal telah tercapai 97,56% dari target triwulan sebesar 82. Indikator ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode Tahun 2023 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker BPPSDMKP. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator ini tidak mengalami kenaikan sebesar 6,67%. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 43. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 18 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	82	80	97,56
2	BPPP Medan	82	82	100
3	BPPP Banyuwangi	82	82	100
4	BPPP Bitung	82	82	100
5	BPPP Ambon	82	60	73,17

Analisis dan Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah pengukuran dilakukan oleh tim inspektorat jenderal KKP yang telah bersertifikat dan berpengalaman dibidang pengawasan. Faktor penyebab keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen. Adapun kegiatan penunjang kegiatan ini adalah melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan.

Indikator Kinerja Utama 19

Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)

Indikator Kinerja Utama Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator baru pada Tahun 2024, pengukuran indikator

ini dilakukan secara tahunan. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Perhitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

- 1) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
- 2) Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
- 3) Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
- 4) Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
- 5) Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Capaian indikator ini belum dapat dilakukan pengukurannya di Triwulan I, karena pengukuran akan dinilai secara tahunan. Indikator ini memiliki target tahunan sebesar 75.

Indikator Kinerja Utama 20

Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (nilai)

Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari hasil input perkembangan dan data capaian pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Indikator capaian keluaran kegiatan, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan Penyerapan Anggaran. Bobot setiap Indikator disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 46 Indikator dan Bobot Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Indikator	Bobot (%)
Capaian Rincian Output Tingkat Satker	43,5
Efisiensi	28,6
Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan	18,2
Penyerapan anggaran	9,7
Jumlah	100

Kategori perhitungan NKA adalah sebagai berikut:

90% < NK = sangat baik

80% < NK ≤ 90% = Baik

60% < NK ≤ 80% = Cukup

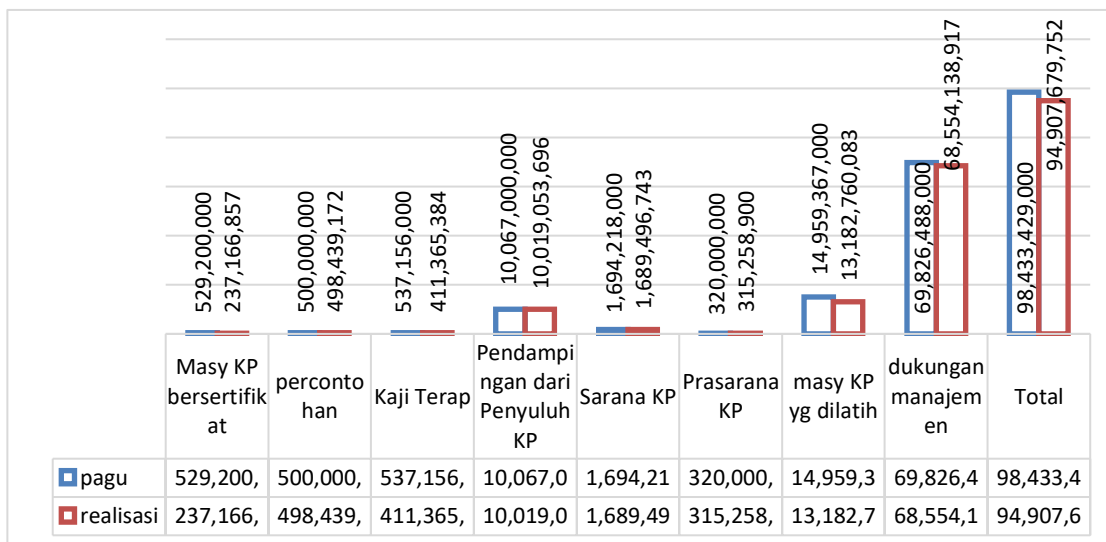
50% < NK ≤ 60% = Kurang

NK ≤ 50% = Sangat Kurang

IKU 20 Nilai kinerja anggaran BPPP Tegal di targetkan sebesar 82 dengan periode pengukuran secara tahunan dilihat dari aplikasi SMART DJA.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 BPPP Tegal didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 117.004.513,000,- telah terealisasi sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp 14,945,193,472,- atau 12,77%. Adapun realisasi per output anggaran Tahun 2024 BPPP Tegal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 14. Realisasi per output anggaran BPPP Tegal s.d Triwulan III

Secara umum kinerja BPPP Tegal pada Triwulan I Tahun 2024 telah berjalan cukup baik, Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi anggaran yang mencapai 96.42%.

Adapun pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Tegal dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Belanja Pegawai	68,798,271,000	4,134,924,714	6.01
Belanja Barang	46,007,916,000	10,507,022,508	22.84
Belanja Modal	2,198,326,000	303,246,250	13.79
TOTAL	117,004,513,000	14,945,193,472	12,77

Tabel 50. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			(Rp)	(Rp)	
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	-	-	-	-
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	120	28,768,180,000	7,637,223,209	27,00
3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	-	-	-	-
4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	120	276,180,000	8,423,200	3,00
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	-	-	-	-
6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	113,33	9,884,200,000	1,419,251,355	14,00

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			(Rp)	(Rp)	
7	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)				
8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	113,33			
9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)	-	-	-	-
10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas)	-	600.000.000	-	-
11	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (Unit)		1,998,326,000	303,246,250	15,00
12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)		200,000,000	-	-
13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	110,44	74,893,171,000	5,498,138,761	7,00
14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (Nilai)		75,100,000	10,246,200	14,00
15	Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	110,44	-	-	-
16	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)		-	-	-
17	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal dibandingkan realisasi anggaran BPPP Tegal TA 2022 (%)		-	-	-

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			(Rp)	(Rp)	
18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	110,44	53,106,000	11,705,877	22,00
19	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)		-	-	-
20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	110,44	256,250,000	56,958,620	22,00
TOTAL PAGU			117.004.513.000	14.945.193.472	13,00

3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Perhitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPPP Tegal 2024

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Efisiensi	
		(Rp)	(Rp)			
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	-	-	-		
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	120	28,768,180,000	7,637,223,209	27,00	93
3	Nilai PNBPN Satker	-	-	-		

Indikator Kinerja Utama		Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Efisiensi
			(Rp)	(Rp)		
	BPPP Tegal (Rupiah Miliar)					
	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	120	276,180,000	8,423,200	3,00	117
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	-	-	-	-	
6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	113,33	9,884,200,000	1,419,251,355	14,00	99,33
7	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)					
8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	113,33				
9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)		-	-	-	
10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas)	-	600.000.000	-	-	
11	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (Unit)		1,998,326,000	303,246,250	15,00	
12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)		200,000,000	-	-	
13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	110,44	74,893,171,000	5,498,138,761	7,00	103,44
14	Nilai Rekonsiliasi	110,44	75,100,000	10,246,200	14,00	96,44

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Efisiensi
		(Rp)	(Rp)		
Kinerja BPPP Tegal (Nilai)					
15 Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	110,44	-	-	-	
16 Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)		-	-	-	
17 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal dibandingkan realisasi anggaran BPPP Tegal TA 2022 (%)		-	-	-	
18 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	110,44	53,106,000	11,705,877	22,00	88,44
19 Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)		-	-	-	
20 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	110,44	256,250,000	56,958,620	22,00	88,44
TOTAL PAGU	115,94	117.004.513.000	14.945.193.472	13,00	102,94

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian sampai dengan Tahun 2024 dari penyerapan anggaran BPPP Tegal sebesar 13, Capaian Rincian Output tercapai 100 dengan nilai efisiensi 102,94. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan.

Efisiensi anggaran BPPP Tegal memperoleh skor +9,15. menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada 2023 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan pada level plus. Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

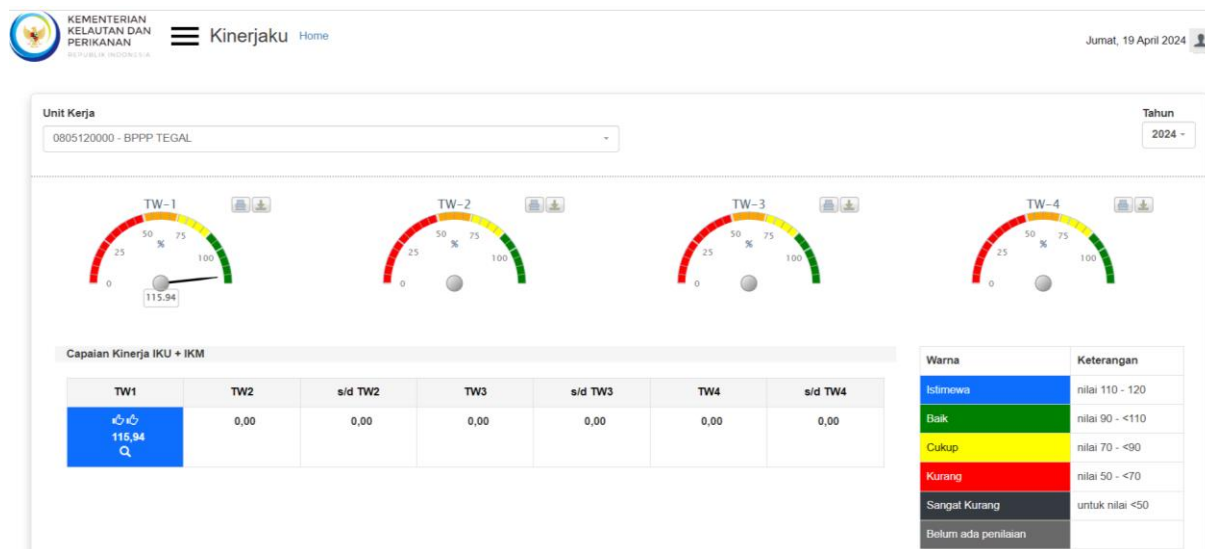
1. Realisasi anggaran pada posisi 13 % dengan tingkat output kegiatan mencapai 100%.
2. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 120%, seperti:
 - a) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal dari target 5.000 mencapai 8.015
 - b) Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal dari target Rp. 1,58 Milyar mencapai 2,97 Milyar.
 - c) SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal dari target 33 orang mencapai 324 orang.

Nilai efisiensi dihitung berdasarkan rentang efisiensi dari -20 sampai +20. Kondisi ini terjadi karena pengukuran output kegiatan dilakukan pada akhir tahun. sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran pada akhir tahun, sehingga diperoleh nilai efisiensi positif (+)

BAB IV PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, besaran data capaian kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 sebesar 115,94%, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 16. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Triwulan I Tahun 2024 telah terealisasi 8 (delapan) indikator kinerja utama, yang semuanya menunjukkan ketercapaian terhadap target yang telah ditetapkan, dengan status indikator capaian biru. Adapun capaian tersebut antara lain:

Tabel 52. Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Target TW I	Realisasi Tahun 2024	
						Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	72	-	-	-
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	17.960	5.000	8.015	120 (160,3)
		3	Nilai PNPB Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	10,53	1,58	2,97	120 (187,97)
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	730	33	324	120 (981,82)
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	49	-	-	-
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	6.400	150	155	103,33
		7	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)	255	-	-	-
		8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	511	10	17	120 (170)
		9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)	1.897	-	-	-
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas)	3	-	-	-
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	11	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar di BPPP Tegal (Unit)	2	-	-	-
		12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)	1	-	-	-
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	20	33,33	120 (166,65)

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Target TWI	Realisasi Tahun 2024	
						Capaian	%
	dan Satker	14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (Nilai)	94	-	-	-
		15	Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP (%)	94	94	106,94	113,77
		16	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	81	-	-	-
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%)	≤ 0,5	-	-	-
		18	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	82	82	80	97,56
		19	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	75	-	-	-
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	82	-	-	-

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut atas rekomendasi pada laporan kinerja tahun sebelumnya Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 53 Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja Tahun 2023

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti
1.	<p>Pemenuhan standar sarana dan prasana untuk diklat keahlian dan ketrampilan bidang kepelautan sesuai dengan peraturan kepala badan, pasca ratifikasi STCW F 1995.</p> <p>Keterbatasan bangunan dan gedung yang dimiliki oleh Balai, hal ini disebabkan karena dalam 1 (satu) kawasan saat ini dengan luas kawasan sebesar 51.135 m² ditempati oleh 3 (tiga) instansi, yaitu Balai, SUPM, dan Politeknik AUP-STP</p>	Mengajukan pelimpahan aset bangunan dan gedung milik SUPM	Membuat BAST pelimpahan aset bangunan dan Gedung dari SUPM Tegak ke BPPP Tegal	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FIfxp6Zigf1RMhyzQqk3e5jImuwWTZKZ

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti
2	Sebagai unit kerja PK BLU BPPP Tegal belum memiliki aplikasi Keuangan berbasis teknologi informasi.	Melakukan kerjasama CSR dari Bank serta mencari penyedia jasa terkait.	Telah membuat aplikasi keuangan dan aplikasi pendaftaran peserta pelatihan yang terintegrasi	https://simkeu.bppptegal.id/display https://bppptegal.id/pelatihan
3	Belum adanya SDM berkualitas Teknologi Informasi	Membuka rekrutmen pegawai	Melaksanakan rekrutmen pegawai BLU BPPP Tegal	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fifxp6Zigf1RMhyzQqk3e5jImuwWTZKZ

4.3. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPP Tegal di Triwulan I Tahun 2024 sudah berjalan dengan baik. Adapun beberapa permasalahan yang masih perlu dilakukan untuk perbaikan kedepan dan rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 54 Permasalahan dan Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No.	Permasalahan	Rencana Aksi
1	Formulir data dukung kegiatan pelatihan dan penyuluhan belum terakomodir di aplikasi SICEPAT	Mengembangkan aplikasi SICEPAT untuk mengakomodir kelengkapan data dukung capaian kinerja
2	Adanya perubahan sistem kerja baru, sehingga perlu penyesuaian	Membuat Surat Keputusan penunjukan tim kerja lingkup BPPP Tegal

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* BPPP Tegal. Data dukung laporan kinerja dapat diakses melalui link <https://bit.ly/KinerjaPuslatluh>. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Tegal. Akhirnya, BPPP Tegal berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal

Achmad Subijakto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih BPPP Tegal (Orang)	17.960
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	10,53
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	730
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Tegal (Orang)	49
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Tegal (Kelompok)	6.400
		7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Tegal (Kelompok)	255
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Tegal (Kelompok)	511
		9	Tenaga kerja yang terlibat Lingkup BPPP Tegal (Orang)	1.897
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Tegal (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	3
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	11	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	2
		12	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Tegal (Nilai)	94
		15	Persentase unit kerja BPPP Tegal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		16	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	81
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Tegal (%)	≤ 0,5
		18	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	75
		20	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	41.726.886.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	75.277.627.000
Total Anggaran BPPP TEGAL		117.004.513.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Achmad Subijakto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

JALAN MARTOLOYO, PO. BOX 22 TEGAL, KODE POS 52122
TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064
LAMAN <https://kkp.go.id/brsdrm/bp3tegal> SUREL bp3p.tegal@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
NOMOR: 8.391 /SK/BBPPP.TGL/KP.110/I/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, dipandang perlu menetapkan petugas pengelola kinerja yang meliputi pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan pengelolaan capaian kinerja;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal;
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
13. Surat Pengesahan DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-032.12.2.239188/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL. |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini. |
| KEDUA | : | Pengelolaan Kinerja terdiri dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, pengisian aplikasi dan pelaporan kinerja sebagaimana Diktum KESATU. |
| KETIGA | : | <p>Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja dengan tugas:</p> <p>A. Pengarah:
memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja BPPP Tegal.</p> <p>B. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola kinerja BPPP Tegal.</p> |

C. Pelaksana:

1. Ketua:

mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;

2. Sekretaris;

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan BPPP Tegal dan;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pengelola Kinerja BPPP Tegal;

3. Sub Tim Perencanaan Kinerja

- a. memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan, dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. memastikan bahwa Indikator Kinerja:
 - 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indikator kinerja level I maupun level II;
 - 2) Indikator Kinerja eselon I telah selaras dengan IKU;
 - 3) Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C, dan
 - 4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi.
- c. memastikan bahwa dokumen kontrak kinerja memuat:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK)
 - a) tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) rincian target IKU secara bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing masing IKU;
 - 3) matriks cascading kinerja kepada penanggungjawab IKU;
 - 4) rencana aksi atas PK dan evaluasinya.
- d. memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- e. memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan

- f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
- 4. Sub Tim Pengukuran Kinerja**
- a. menyusun mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan);
 - c. memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - d. mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
- 5. Sub Tim Pelaporan Kinerja**
- a. mengoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan);
 - b. memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - d. memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam laman resmi; dan
 - e. mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
- 6. Sub Tim Evaluasi Kinerja**
- a. melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan;
 - d. menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - e. mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
- 7. Sub Tim Verifikasi Kinerja**
- a. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - b. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - c. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
 - d. memastikan seluruh *softcopy* data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan

kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi daring; dan
e. mengoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelolaan Kinerja menyusun dan melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal per triwulan (Interim) dan Tahunan (Laporan Kinerja/LKj).
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan dalam penetapan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 15 Januari 2024
Kepala Balai,



ACHMAD SUBIJAKTO, A.Pi, M.P
NIP. 19681207 199303 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BPPP TEGAL NOMOR
 30 /SK/BPPP.TGL/KP.110/I/2024 TENTANG
 TIM PENGELOLA KINERJA BALAI PELATIHAN
 DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA
 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

- A. Pengarah
 Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
- B. Penanggung Jawab
 Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
- C. Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Yuda Adyatama Firmansyah, S. E	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
2	Qonita Hidayana, A. Md	Pengelola Program dan Laporan	Sekretaris
Sub Tim Perencanaan Kinerja			
1	Seto Satrio Ginasib, S.Pi	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Koordinator
2	Ade Yunaifah Afriyani, S.E, M.Pi	Widyaiswara Ahli Muda	Anggota
3	Ratih Mahargiani, S.Pi, M.Si	Penyusun Program Penyelenggara Diklat	Anggota
Sub Tim Pengukuran Kinerja			
1	Lutfi Jauhari, S.St.Pi., M.Si	Widyaiswara Ahli Madya	Koordinator
2	Agus Widiyanto, S.St.Pi, M.Pi	Widyaiswara Ahli Madya	Anggota
3	NurHidayah, S.Pi	Pengelola Program dan Laporan	Anggota
Sub Tim Pelaporan Kinerja			
1	Rika Putri, S. St. Pi, M.P	Widyaiswara Ahli Madya	Koordinator
2	Uli Safriani, S. Kel., M.I.L	Pengelola Monev	Anggota
3	Miftah Farid, A.Md.,S.ST.Pi	Instruktur Penyelia	Anggota
Sub Tim Evaluasi Kinerja			
1	Eko Widayanto Nugroho, S.Pi	Analisis Materi Penyuluhan	Koordinator
2	Trias Wahyuning Putri,S.Pi, M.Pi	Widyaiswara Ahli Madya	Anggota
3	Nur Azizah, S. AP	Analisis SDM Aparatur	Anggota

Sub Tim Verifikasi Kinerja			
1	Dedi Hertono, S.St.Pi, M.Pi,	Perencana Muda	Koordinator
2	Septa Hadi Nugroho, S. E	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
3	Ahmad Harianto, S.Pi	Instruktur Muda	Anggota

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 15 Januari 2024
Kepala Balai,



ACHMAD SUBIJAKTO, A.Pi, M.P
NIP. 19681207 199303 1 004

